

AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SINERGI UMKM DAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Nofita Wulansari¹, Wahyu dan Yunus Kurniawan
¹Universitas Jember, nofita.wulansari.94@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi pembahasan menarik dan menjadi arah sasaran kebijakan di berbagai negara. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ditengah berkembangnya teknologi saat ini, *financial technology* (FINTECH) menjadi strategi yang efektif untuk mendorong peningkatan akses keuangan serta pembiayaan UMKM dimana tujuan akhir untuk menurunkan kesenjangan di suatu negara dapat tercapai. Selain itu penerapan *good governance* juga penting diterapkan sebagai kerangka konsep *sustainability*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergi UMKM melalui *financial technology* dan *good governance* dapat menurunkan kesenjangan dan mendorong pembiayaan bagi sektor UMKM. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil temuan ini diperlukan harmonisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah untuk mendorong pembangunan UMKM melalui kemudahan akses permodalan. Selain itu, konsep *good governance* juga sangat penting agar unit usaha mampu bertahan ditengah persaingan bisnis serta tantangan perekonomian global.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, UMKM, *good governance*, *fintech*

Abstract

Inclusive economic growth is an interesting discussion and a policy objective in many countries. One of the sectors that have an important role in boosting economic growth is the sector of Micro Small and Medium Enterprises (SMEs). In the midst of today's technology development, financial technology (FINTECH) is an effective strategy to encourage increased access to finance and financing of SMEs where the ultimate goal of reducing the gap in a country can be achieved. In addition, the implementation of good governance is also important to be applied as a sustainability concept framework. This study aims to find out how the synergy of SMEs through financial technology and good governance can reduce the gap and encourage financing for the sector of SMEs. The research method used is descriptive analysis method to answer the problem in this research. Based on these findings, it is necessary to harmonize the policies issued by Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Government to encourage the development of SMEs through the access to capital. In addition, the concept of good governance is also very important for business units to survive in the midst of business competition and global economic challenges.

Keywords: *economic growth, SMEs, Good Governance, Fintech*

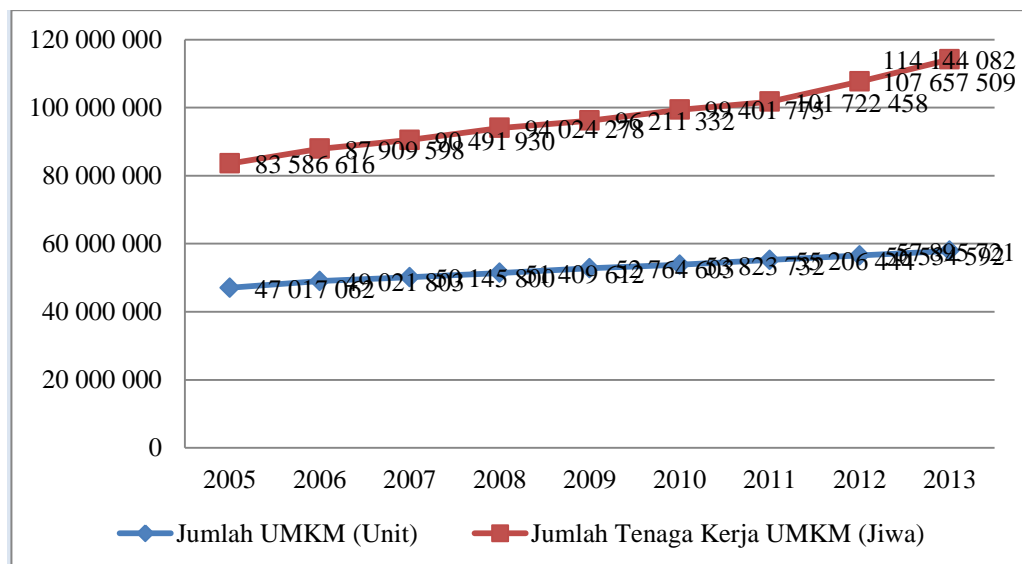
PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi fokus utama yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan baik melalui bank sentral maupun pemerintah. Inovasi baru pada sektor produktif dipandang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama di negara berkembang (Chughtai 2014; Oecd

2004). Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting.

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia (Chughtai 2014; Oecd 2004; Ogbuanu, Kabuoh, and Okwu 2014). Usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia hal ini terbukti dari bertahannya sektor UKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis.

UMKM merupakan sektor yang dapat menekan tingkat ketimpangan baik ekonomi dan sosial, menumbuhkan sistem kekeluargaan dan kerjasama, dan dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan daya beli terhadap komoditas jadi dalam negeri. UMKM Indonesia saat ini mengalami peningkatan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Dalam perkembangannya, UMKM Indonesia mengalami berbagai kendala dalam menyambut persaingan bebas. Permasalahan utama yang menghambat perkembangan UMKM diantaranya keterbatasan modal, teknologi, kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan dalam mengakses informasi tentang peluang pasar, sumber daya manusia (tenaga kerja) yang memiliki *soft skill* rendah (Chughtai 2014; Oecd 2004; Ogbuanu, Kabuoh, and Okwu 2014). Hal ini menyebabkan ketimpangan yang sangat besar antara usaha kecil dan usaha besar serta menjadi hambatan tersendiri bagi usaha kecil untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional..



Gambar 1. Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM di Indonesia Tahun 2005-2013. Sumber: Badan Pusat Statiska, 2017

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistika, Gambar 1 menjelaskan bahwa pada tiap tahunnya jumlah UMKM mengalami peningkatan yang diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Selain berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor UMKM juga berpotensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada industri besar (Lekhanya 2015; Otoritas Jasa Keuangan 2015). Namun, permasalahan permodalan menjadi poin utama yang menghambat perkembangan sektor usaha kecil.

Kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting dalam keberhasilan pembangunan UMKM di suatu negara. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan inovasi-inovasi pembiayaan keuangan yang dapat mempermudah pembiayaan UMKM. *Financial Technology* merupakan salah satu model pembiayaan yang saat ini menjadi tren. Fintech dipandang berpeluang besar untuk meningkatkan akses keuangan (inklusi keuangan). Dengan adanya inovasi ini dapat mempermudah UMKM untuk mendapatkan modal, melakukan pembayaran, dan memperluas usaha mereka ke berbagai daerah. Tata kelola yang baik atau yang lebih dikenal *good governance* juga perlu diaplikasikan untuk mendorong usaha kecil menjadi usaha yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru (Afrifa and Tauringana n.d.; Jaswadi 2016; Maher and Andersson 1999).

Tata kelola yang baik (*good governance*) dievaluasi sebagai peluang keamanan ekonomi, perbaikan lingkungan bisnis dan menyerap investasi asing dan domestik melalui enam indikator (Afrifa and Tauringana n.d.; Brunninge, Nordqvist, and Wiklund 2007; Dzigba 2015). Enam indikator tersebut diantaranya pengendalian korupsi, peraturan perundang-undangan, peraturan tentang kualitas, efektivitas pemerintah, stabilitas politik dan hak untuk memberikan komentar dan tanggapan oleh lembaga internasional dan status masing-masing negara, masing-masing pemerintah, dan posisinya di peringkat dunia serta melakukan transparansi dengan melakukan pengumuman setiap tahunnya.

Tantangan perekonomian global serta adanya ketidakpastian dalam perekonomian diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Fenomena masyarakat ekonomi Asean memberikan peluang dan tantangan yang semakin besar terhadap pelaku UMKM di kawasan Asean. Perdagangan bebas ini mengharuskan setiap negara memiliki spesialisasi dan juga kemampuan untuk dapat bersaing. Selain itu teknologi yang digunakan juga harus diperhatikan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan juga dapat meningkatkan produk yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi permintaan dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, dalam paper ini ingin menganalisis lebih jauh peran UMKM seiring perkembangan teknologi serta *good governance* dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini berupa analisis deskriptif naratif dan studi literatur. Analisis deskriptif naratif bertujuan untuk memaparkan konsep dalam mensinergikan peran sektor UMKM serta *good governance* dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perkembangan Teknologi

UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM menjadi dasar dari berkembangnya industri besar. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi menyebabkan terjadinya transformasi dari masyarakat yang awalnya bekerja di sektor pertanian menuju masyarakat industri (Brunninge, Nordqvist, and Wiklund 2007; Chughtai 2014). Dengan semakin berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan pertumbuhan penduduk yang mulai berkembang menjadikan luas tanah semakin berkurang, tanah yang awalnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan mulai beralih fungsi karena pembangunan untuk dijadikan pertokoan dan tempat tinggal. Selain itu dengan alat-alat yang semakin canggih maka kegiatan pertanian juga mulai mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia yang kemudian diganti dengan tenaga kerja mesin karena lebih efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran di kalangan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Untuk itu perlu menciptakan kemandirian masyarakat agar dapat menciptakan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memunculkan ide-ide kreatifitasnya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN dan tantang perekonomian global, Indonesia harus menarik investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya sehingga dapat membantu pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Selain itu modal investor tersebut juga dijadikan modal untuk membangun dan memperbaiki struktur ekonomi nasional maupun daerah di Indonesia sebagai salah satu langkah mengembangkan UMKM. Pengembangan UMKM ini perlu direncanakan secara strategis sesuai tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan sehingga pengembangan kebijakan ini dapat secara optimal dan terstruktur sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan dan kemakmuran bagi masyarakat. Selain itu dengan tahapan-tahapan yang terstruktur dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sektor UMKM yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam pengembangan UMKM diperlukan suatu kreatifitas dan inovasi-inovasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya sehingga produk-produk yang dipasarkan dapat berkompetisi dalam level nasional maupun internasional.

Kreativitas (*creativity*) didefinisikan oleh Webster sebagai kecakapan memunculkan sesuatu yang baru (*the ability to bring something new into existence*). Ditegaskan oleh Webster bahwa kreatifitas merupakan sebuah proses mental yang melibatkan pemunculan ide-ide dan konsep-konsep baru, atau hasil kombinasi-kombinasi baru antara ide-ide dan konsep-konsep yang ada (*a mental process involving the generation of new ideas or concepts, or new associations between existing ideas or concepts*). Berpikir kreatif merupakan cara berfikir yang menghasilkan sesuatu yang baru (*novelty*). (Iwan Setiawan: 65). Sedangkan Inovasi menurut Stephen Robbins mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.

Dalam strategi pengembangan UMKM ini memiliki hambatan jika tidak melalui perencanaan yang matang. Hambatan tersebut antara lain sumber daya manusia yang masih memiliki kualitas rendah karena rata-rata masyarakat Indonesia memiliki pendidikan yang rendah terutama masyarakat pedesaan. Teknologi yang digunakan untuk proses produksi masih sederhana. Selain itu keterbatasan informasi dan juga modal menjadi penghalang untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan UMKM maka diperlukan peran pemerintah agar memberikan pelatihan atau mengedukasi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat, selain itu bantuan modal untuk mengembangkan usahanya sangat diperlukan, bantuan teknologi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi usaha mereka. Perbankan memiliki peran penting dalam pendanaan terutama dari sisi pinjaman atau penetapan kebijakan.

Program keuangan berkelanjutan yang diimplementasikan melalui *financial technology* khususnya di Indonesia yaitu adanya hambatan pada minimnya penguasaan masyarakat akan pengembangan infrastruktur dan menuju pembiayaan yang inovatif. Masyarakat sebagai pelaku dari kegiatan perekonomian harus mampu mengetahui dinamika yang terjadi pada proses pembiayaan terutama pada pengembangan infrastruktur. *Fintech model* merupakan inovasi strategi untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan sektor UMKM yang merupakan industri kreatif yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Dengan Lembaga Pembiayaan yang berbasis teknologi akan mampu meningkatkan minat investor di Indonesia.

Fintech memberikan kemudahan akses pembiayaan, investasi masyarakat menengah bawah sampai pedesaan yang belum terjangkau layanan keuangan formal. *Fintech* digunakan sebagai pembinaan dan membangun ekonomi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM yang kreatif. Dengan terkoneksi internet, UMKM mendapat kemudahan untuk proses produksi seperti membeli bahan baku, penjualan produk dan pembayaran barang yang dibeli maupun dijual. Melalui *fintech*, UMKM dapat melakukan promosi melalui media sosial yang saat ini menjadi tren di masyarakat. Melalui inovasi

model pembiayaan terbaru ini dapat menjangkau berbagai daerah, menampung UMKM yang saling berhubungan dalam usaha mereka sehingga dapat saling sharing dan bertukar informasi, dari pemasok sampai customer.

UMKM dan Good Governance

Krechovska dan Prochazkova (2013) menyatakan bahwa pentingnya penerapan *good governance* dalam bisnis pada skala manapun dibutuhkan dalam kerangka konsep *sustainability*. Isu mengenai penerapan *good governance* pada UKM masih menjadi perdebatan. Apakah tata kelola yang profesional pada sektor UMKM relevan dalam rangka memberdayakan UMKM. Sektor pengelolaan UMKM cenderung dimanajemen sendiri sehingga produktivitas usahanya sangat rendah. Industri kecil masih kurang memperhatikan kualitas dan desain produknya sehingga tidak mampu berkompetisi di pasar. Penelitian terdahulu telah dilakukan di beberapa Negara. Perdebatannya adalah mengenai bagaimana norma atau aturan *governance* yang sesuai (Dube, 2011, Afrifa and Tauringana,.; Maher and Andersson, 1999)).

Pada kasus hasil penelitian di Indonesia, *good governance* pada UKM relatif baru dan masih sedikit mendapat perhatian. Salah satu riset terbaru menjelaskan bahwa berjalannya mekanisme *good governance* pada UKM yang efektif ditandai dengan tingginya penerapan semua prinsip *good corporate governance* (Maskur, 2012). Dengan semakin kuat penerapan indikator-indikator atas aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan serta kewajaran, maka semakin efektif mekanisme *governance* diterapkan (Brunninge, Nordqvist and Wiklund, 2007; Dzigba, 2015; Lekhanya, 2015). Penerjemahan prinsip-prinsip tersebut ke dalam mekanisme, proses, dan struktur tata kelola selayaknya pada skala usaha besar. Suksepsi yang direncanakan secara baik dan pengaturan *family governance* masih belum banyak mendapatkan perhatian dari literatur yang ada.

KESIMPULAN

Peran UMKM di Indonesia menjadi poin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercapture pada tahun 1997, UMKM mampu bertahan dan menyelamatkan perekonomian bangsa ketika terjadi krisis. Upaya dalam mensinergikan UMKM dapat dilakukan melalui tata kelola (*good governance*) yang baik, pola kemitraan serta memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah. Selain itu, pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan mempermudah akses pembiayaan atau modal sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal. Pendampingan dan mengedukasi UMKM juga menjadi poin penting untuk diperhatikan agar mampu mengembangkan usaha melalui inovasi-inovasi baru serta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi seperti *financial technology*.

DAFTAR PUSTAKA

Afrifa, G. A. and Tauringana, V. (no date) 'Corporate governance and performance of UK listed small and medium enterprises'. doi: 10.1108/CG-03-2015-0029.

Badan Pusat Statistik (BPS). bps.go.id

- Brunninge, O., Nordqvist, M. and Wiklund, J. (2007) 'Corporate governance and strategic change in SMEs: The effects of ownership, board composition and top management teams', *Small Business Economics*, 29(3), pp. 295–308. doi: 10.1007/s11187-006-9021-2.
- Chughtai, M. W. (2014) 'Impact of Small and Medium Enterprises on Economic Growth: Evidence from Pakistan', 2(July), pp. 19–24.
- Dzigba, A. D. (2015) 'Corporate Governance Practice among Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Ghana ; Impact on Access to Credit', pp. 1–76.
- Dube, I. 2011. Corporate Governance Norm for S ME *Journal for Public Administration and Governance*, 1(2), 77-123
- Jaswadi (2016) 'Penerapan Good Governance pada Perusahaan Skala Kecil dan Menengah Non Go Public', *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 1(3), pp. 236–248. doi: 10.18382/jraam.v1i3.39.
- Krechovzka, M., & Prochazkova, P. T. 2014. Sustainability and Its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting, *Procedia Engineering*, 69(2014), 1144-1151.
- Lekhanya, L. M. (2015) 'Leadership and Corporate Governance of Small and Medium Enterprises (Smes) in South Africa: Public Perceptions', *Corporate Ownership & Control*, 12(3), pp. 215–222. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Maher, M. and Andersson, T. (1999) 'CORPORATE GOVERNANCE : EFFECTS ON FIRM PERFORMANCE AND by'.
- Oecd (2004) 'Promoting SMEs for Development', *2nd OECD CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs)*, (June), pp. 1–59.
- Ogbuanu, B. K., Kabuoh, M. N. and Okwu, A. T. (2014) 'RELEVANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE GROWTH OF THE NIGERIAN ECONOMY : A STUDY OF MANUFACTURING SMEs', *International Journal of Advanced Research in Statistics, Management and Finance*, 2(1), pp. 180–191.
- Otoritas Jasa Keuangan (2015) 'Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah'.
- Setiawan, Iwan. *Agribisnis, Kreatif Pilar Wirausaha Masa depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*. Jakarta: Penebar Swadaya.